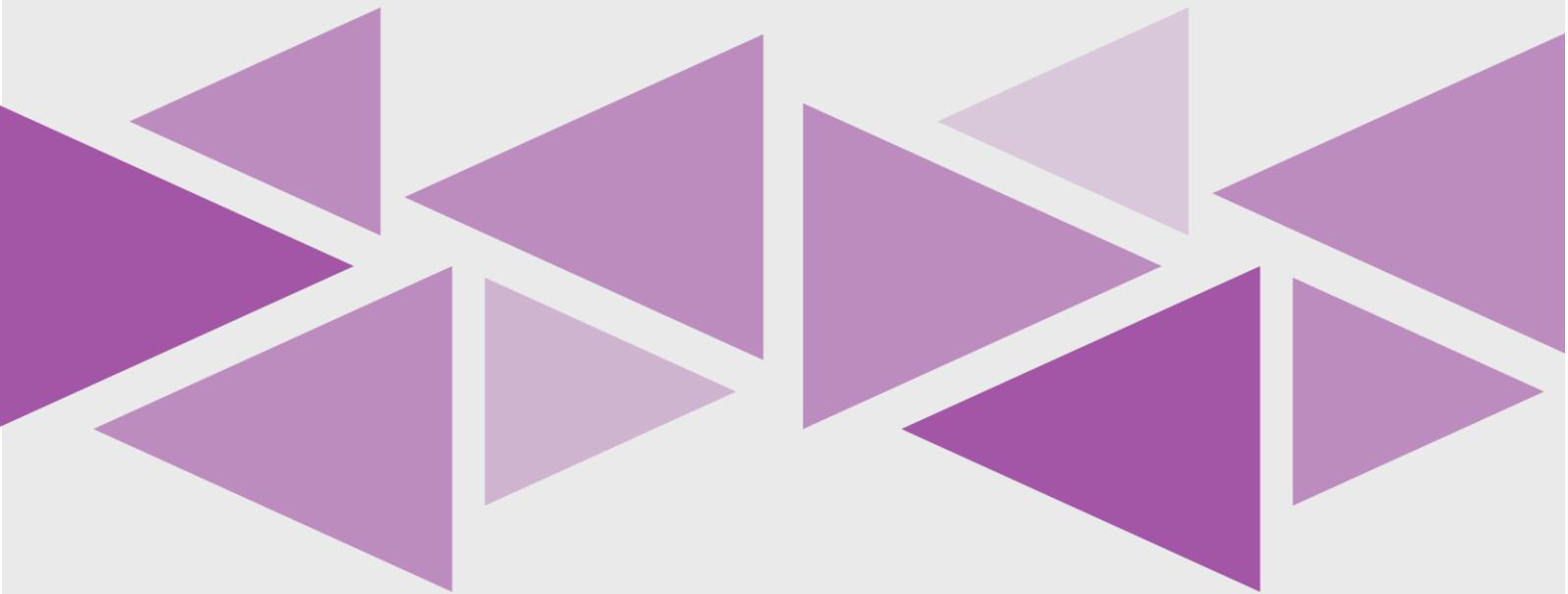




2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2024-2026, ditetapkan bahwa visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**, dimana Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengimplementasikan misi **“MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI LOKAL”**. Tahun 2024 adalah tahun ke satu dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang memiliki tugas melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 3 (tiga) sasaran OPD antara lain:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

3. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah mengajukan pada PD terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024.

Dalam tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak 3 (tiga)

sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN	IKU	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	95,81%
		Pertumbuhan UMKM	100 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 Indikator tersebut, 4 memenuhi target dan 1 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tetapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui DBHCHT dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.267.151.484 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.507.098.311 atau 90,87 %.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan

Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, 24 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



M. HAMAD HUSNI, SH, MH
NIP. 19670424 198703 1 003

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.5. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas.....	6
1.6. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	8
1.7. Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.8. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	11
1.9. Tindak Lanjut LHE.....	20
1.10. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis	22
2.1.1. Visi.....	23
2.1.2. Misi.....	23
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	24
2.2. Perjanjian Kinerja.....	24
2.3. Rencana Anggaran.....	27
2.4. Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	28

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2. Prestasi OPD yang diraih selama tahun 2023 dan Inovasi.....	45
3.3. Realisasi Anggaran.....	46

BAB IV Penutup

4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	63

Lampiran

20BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan tugas dan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Instansi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diperjanjikan oleh Pimpinan Dinas/ Instansi dengan Kepala Daerah. Sejalan dengan itu Pegawai atau Pemimpin (Kepala) suatu Dinas/ Instansi, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menunjukkan bahwa, tidak semua Pegawai atau Pemimpin selalu giat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang di harapkan, seringkali masih terdapat kesenjangan kinerja atau mengalami kesulitan memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap Pegawai atau Pemimpin dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja Instansi / Organisasi ditempat mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja

kendala-kendala yang dihadapi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan bagaimana meminimalisir kekurangan dimaksud, oleh karena itu perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Begitu pula Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dengan tujuan; sebagai Pertanggungjawaban Instansi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta Kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah

yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini memuat perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif,

efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

1.3. DASAR HUKUM.

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

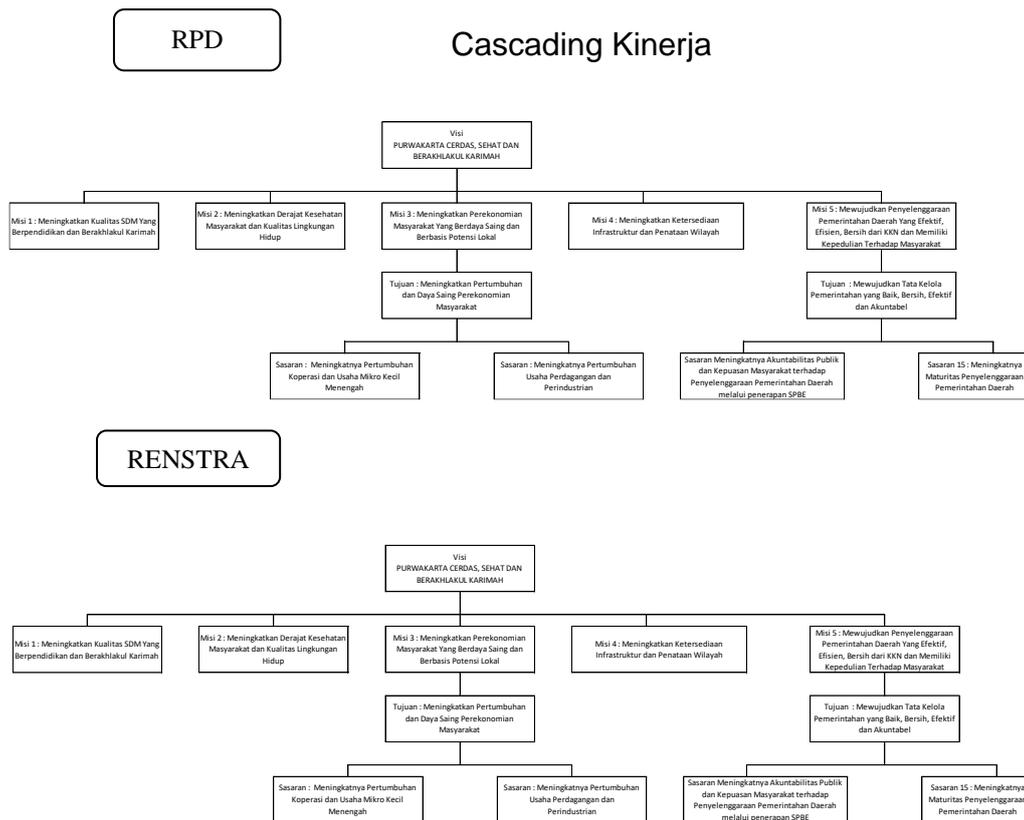
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Purwakarta tahun 2024-2026. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

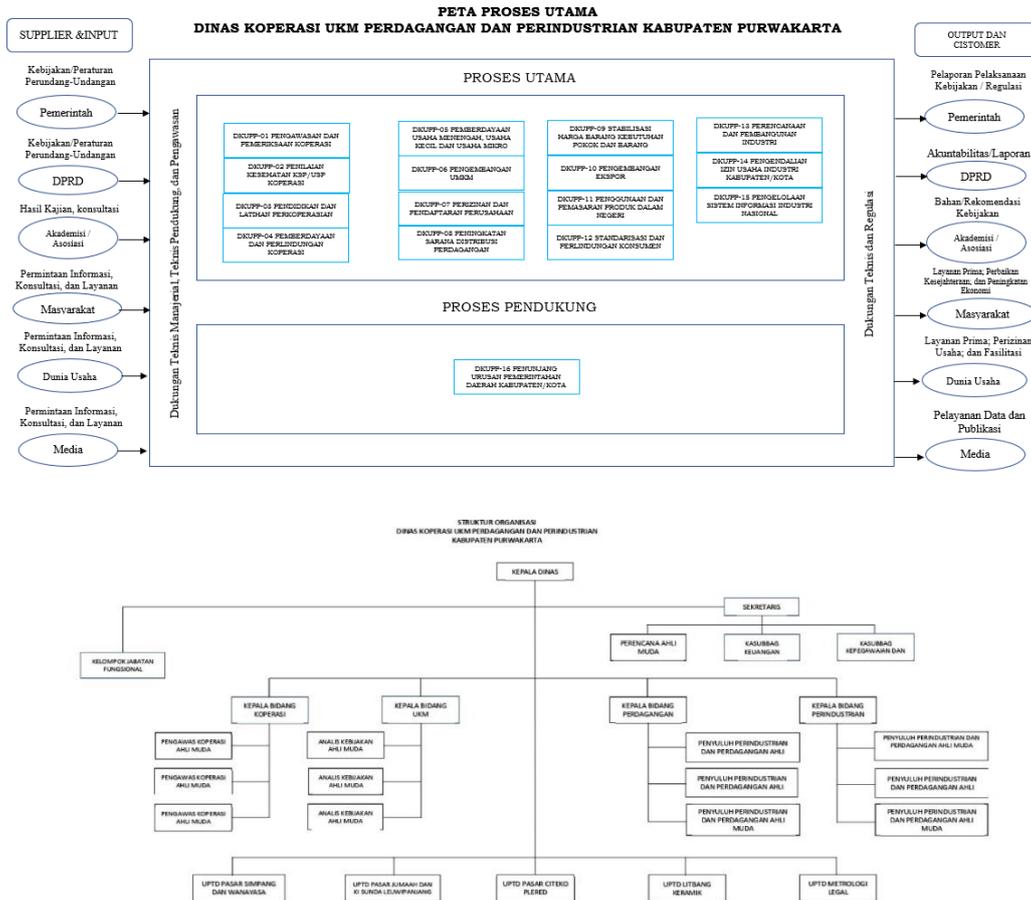
Gambar 1.1 C



1.5. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Purwakarta sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (dua) Sub bagian, 1 (satu) fungsional, 5 Kepala UPTD dan 4 (empat) Kepala Bidang membawahi pejabat Fungsional Yaitu:

1. Kepala Bidang Koperasi;
2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
3. Kepala Bidang Perdagangan;
4. Kepala Bidang Perindustrian, dan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Jum'at dan Ki-Sunda Leuwipanjang;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wanayasa
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Citeko Plered,
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Sentra Keramik, dan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal; yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi langsung Kepala Dinas.
 - f. Pejabat Fungsional

1.6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan

sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangandan Perindustrian.

Layanan produk Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Layanan Pengawasan terkait koperasi
2. Layanan Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian
3. Layanan pelatihan terkait UKM
4. Layanan fasilitasi kemudahan perizinan
5. Layanan verifikasi perizinan terkait perindustrian
6. Layanan Pembinaan dan Pengawasan terkait perindustrian

7. Layanan Pembinaan dan Pengawasan terkait perdagangan
8. Layanan verifikasi perizinan terkait perdagangan
9. Layanan pengawasan alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya, BDKT dan satuan ukuran.
10. Layanan tera dan tera ulang alat-alat UTTP

1.7. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI (PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI)

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas dan fungsinya:

1. Sumber Daya Manusia yang relatif rendah menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas.
2. Kurangnya pengembangan pemasaran online untuk memasarkan produk UKM.
3. Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat
4. Sarana dan prasarana perdagangan pasar tradisional yang belum seluruhnya layak /representative
5. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum professional

Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa isu strategis tersebut yang dapat dirumuskan upaya pemecahan yaitu:

1. Adanya pemberdayaan pelaku usaha dibidang perindustrian dan perdagangan untuk dapat menarik para investor agar dapat memanfaatkan lokasi lahan kawasan dan zona industri dengan daya dukung adanya sarana jalan tol sebagai penunjang kemudahan berinvestasi di Purwakarta.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai.
3. Adanya peningkatan kemampuan dan keahlian dibidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah untuk meningkatkan peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, serta untuk meningkatkan peran kelembagaan usaha / kemitraan dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah.
4. Adanya jumlah pegawai dan anggaran yang cukup memadai untuk menumbuh kembangkan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, industri dan perdagangan.
5. Adanya kualitas, disiplin dan motivasi kerja aparatur (iklim kerja yang kondusif) untuk meningkatkan produktivitas koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
6. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;.

1.8. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan
Kompetensi

NO	Jabatan	Sub Organisasi	Formasi		Pegawai yang ada	
			Jml	Kuali	Jml	Kuali
1	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	-	-
2	Sekretaris Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S2
3	Kasubbag.Keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
4	Kasubbag.Kepegawaian dan Umum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
5	Kepala Bidang Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
6	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S2
7	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S2
8	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S2
9	Kepala UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
10	Kasubbag.TU UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S2
11	Kepala UPTD Pasar Wanayasa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	-	-
12	Kasubbag.TU UPTD Pasar Simpang Pasar dan Pasar Wanayasa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
13	Kepala UPTD Pasar Citeko Plered	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1

14	Kasubbag.TU UPTD Pasar Citeko Plered	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
15	Kepala UPTD Pengembangan Sentra Keramik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
16	Kepala UPTD Metrologi Legal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
17	Kasubbag.TU UPTD Metrologi Legal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	S1	1	S1
18	JF Perencana Ahli Muda	Sekretariat	1	S1	1	S2
19	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sekretariat	1	S1	1	S1
20	Pengelola Program Dan Laporan	Sekretariat	1	D3	-	-
21	Pengelola Kegiatan Dan Anggaran	Sekretariat	1	D3	-	-
22	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Sekretariat	1	SMA	1	SMA
23	Bendahara	Sekretariat_Subbag. Keuangan	2	S1	2	SMK
24	Penata Keuangan	Sekretariat_Subbag. Keuangan	1	S1	1	SMEA
25	Pengelola Keuangan	Sekretariat_Subbag. Keuangan	2	D3	-	-
26	Pengelola Pendapatan	Sekretariat_Subbag. Keuangan	1	D3	-	-
27	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat_Subbag. Keuangan	1	SMA	-	-
28	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	S1	-	-
29	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	S1	1	S1
30	JF Arsiparis Ahli Muda	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	S1	-	-
31	JF Arsiparis Ahli Pertama	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	S1	1	S1
32	JF Arsiparis Terampil	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	D3	-	-

33	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	2	D3	2	SMA
34	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	2	D3	1	SMA
35	Pranata Kearsipan	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	2	D3	1	SMA
36	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	1	SMA	-	-
37	Pengadministrasi Umum	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	3	SMA	-	-
38	Pramu Kebersihan	Sekretariat_Subbag. Kepegawaian dan Umum	2	SD	2	SD
39	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	-	-
40	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	1	S1
41	Analisis Koperasi	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	1	S1
42	Pranata Koperasi	Bidang Koperasi DKUPP	2	D3	-	-
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Koperasi DKUPP	1	SMA	-	-
44	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	1	S1
45	Penyuluh Koperasi	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	-	-
46	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi DKUPP	1	D3	-	-
47	Pranata Koperasi	Bidang Koperasi DKUPP	1	D3	-	-
48	Pengadministrasi Umum	Bidang Koperasi DKUPP	1	SMA	-	-
49	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	-	-
50	Analisis Bimbingan Usaha	Bidang Koperasi DKUPP	1	S1	-	-
51	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	Bidang Koperasi DKUPP	1	D3	-	-
52	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Bidang Koperasi DKUPP	1	SMA	1	SMA

53	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	Bidang Koperasi DKUPP	4	S1	-	-
54	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	1	S1
55	Fasilitator Promosi	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	1	S1
56	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	D3	-	-
57	Pengadministrasi Umum	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	SMA	-	-
58	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	-	-
59	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	1	S1
60	Pengelola Data	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	D3	-	-
61	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	SMA	1	SMA
62	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	-	-
63	Fasilitator Kewirausahaan	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	S1	-	-
64	Pengelola Data	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	D3	-	-
65	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Bidang Usaha Kecil dan Menengah DKUPP	1	SMA	1	SMA
66	JF Pengawas Perdagangan Ahli Madya	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	-	-
67	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perdagangan DKUPP	2	S1	-	-
68	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	-	-
69	Pengelola Data	Bidang Perdagangan DKUPP	1	D3	-	-
70	Pengelola Fasilitasi dan mediasi Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan DKUPP	1	D3	-	-

71	JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	Bidang Perdagangan DKUPP	2	S1	-	-
72	JF Analis Perdagangan Ahli Madya	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	-	-
73	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perdagangan DKUPP	2	S1	-	-
74	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	Bidang Perdagangan DKUPP	2	S1	-	-
75	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	1	S1
76	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	1	SMA
77	Pengolah Data	Bidang Perdagangan DKUPP	1	D3	1	SMA
78	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	-	-
79	Fasilitator Perdagangan	Bidang Perdagangan DKUPP	1	S1	1	SMA
80	Pengelola Distribusi Pemasaran	Bidang Perdagangan DKUPP	1	D3	-	-
81	Pengadministrasi Umum	Bidang Perdagangan DKUPP	1	SMA	-	-
82	JF Pembina Industri Ahli Madya	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
83	JF Pembina Industri Ahli Muda	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
84	JF Pembina Industri Ahli Pertama	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
85	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
86	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	1	S2
87	Analisis Kerjasama Industri	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-

88	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	1	S1
89	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	1	S1
90	Pengadministrasian Identifikasi Evaluasi Sentra Pengawasan Produk	Bidang Perindustrian DKUPP	1	SMA	-	-
91	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
92	Analisis Pengawasan Mutu Produk	Bidang Perindustrian DKUPP	1	S1	-	-
93	Pengelola Data	Bidang Perindustrian DKUPP	1	D3	-	-
94	Pengadministrasian Identifikasi Evaluasi Sentra Pengawasan Produk	Bidang Perindustrian DKUPP	1	SMA	-	-
95	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Bidang Perindustrian DKUPP	2	S1	2	S1
96	Pengelola Sumber Pendapatan asli Daerah	UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	1	D3	-	-
97	Pengelola Data	UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	1	D3	1	SMA
98	Pengadministrasian Umum	UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	1	SMA	-	-
99	Juru Pungut Retribusi	UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	4	SMA	2	SMA
100	Pramu Kebersihan	UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	4	SD	3	SD
101	Pengelola Sumber Pendapatan asli Daerah	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	1	D3	-	-
102	Pengelola Data	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	1	D3	-	-
103	Pengadministrasian Umum	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	1	SMA	-	-

104	Juru Pungut Retribusi	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	4	SMA	-	-
105	Pramu Kebersihan	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	4	SD	-	-
106	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	UPTD Pasar Citeko Plered	1	D3	-	-
107	Pengelola Data	UPTD Pasar Citeko Plered	1	D3	-	-
108	Pengadministrasi Umum	UPTD Pasar Citeko Plered	1	SMA	-	-
109	Juru Pungut Retribusi	UPTD Pasar Citeko Plered	4	SMA	2	SMA
110	Pramu Kebersihan	UPTD Pasar Citeko Plered	4	SD	1	SD
111	Pengelola Data	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	D3	-	-
112	Pengelola sampel pengujian	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	D3	-	-
113	Pengelola Dokumentasi	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	D3	-	-
114	Pengadministrasi Pelatihan	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	SMA	-	-
115	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	SMA	-	-
116	Pengadministrasi Persuratan	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	SMA	-	-
117	Pengadministrasi Umum	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	SMA	1	SMA
118	Pramu Bakti	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	SD	-	-
119	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli-Pertama	UPTD Metrologi Legal	1	S1	1	S1
120	JF Penera Ahli Muda	UPTD Metrologi Legal	2	S1	1	S1
121	JF Penera Ahli-Pertama	UPTD Metrologi Legal	2	S1	-	-
122	JF Penera Pelaksana	UPTD Metrologi Legal	4	D3	4	D3
123	Pengelola Keuangan	UPTD Metrologi Legal	1	D3	-	-
124	Pengolah Data	UPTD Metrologi Legal	1	D3	-	-
125	Pengadministrasi Umum	UPTD Metrologi Legal	1	SMA	-	-
Jumlah			165			

Sumber : Data Kepegawaian DKUPP 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dari data formasi jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 165 orang, formasi pegawai yang terisi sejumlah 64 orang, atau 39 %.

Tabel 1.2
Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	
1	Alat-alat besar	-
2	Alat-alat Angkutan	-
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	786.496.600
5	Bangunan Gedung	24.598.895,62
	Jumlah	811.095.496

Sumber : Data Sarana Prasarana DKUPP 2024

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2023	10.649.925.676	6.023.145.416	16.673.071.092
2024	9.975.325.676	9.291.825.808	19.267.151.484

Sumber : Bagian Keuangan DKUPP 2024

Anggaran belanja total pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.673.071.092, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.267.151.484, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.594.080.392

1.9. TINDAK LANJUT LHE SAKIP DKUPP TAHUN 2024

Atas LHE SAKIP DKUPP Tahun 2023 yang telah disampaikan melalui surat Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor PW.02.02/449/Insp-Irban/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjutinya sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Tindak Lanjut LHE SAKIP
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

NO	Uraian LHE SAKIP	Tindak Lanjut
1	Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja	Sudah dilengkapi
2	Memperhatikan kelengkapan formal dan waktu penetapan pada perencanaan kinerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah dilengkapi
3	Melengkapi bukti tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bukti dokumentasi	Sudah dilengkapi
4	Senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capain kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan	Sudah dilengkapi

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi, Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Analisis Anggaran yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu tiga tahun 2024-2026.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi,

misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

2.1.1. VISI

mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : **“ PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

2.1.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam misi, yaitu :

“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal “

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan

revisi Renstra secara berkala. berikut merupakan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, sedangkan tujuan dari misi yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	89,7	89,8	90,05	269.55
		Pertumbuhan UMKM	11,86	13,16	14,69	39.71
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	47.737.192.933	48.711.421.360	143.231.063.365
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	IKU	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,7
		Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp	46.782.449.072
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik

Tabel 2.3
Program

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	15.100.717578
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	87,5	50.000.000
3	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	89,7	125.000.000
4	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	89,7	200.000.000
		Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	12	
5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian			189.707.600
6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	85,23	1.060.882.816
		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	56,46	
		Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	75,23	
		Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	2,53	
		Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	57,9	

7	Program pengembangan umkm	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	20,56	538.157.690
		Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	9,63	
8	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95,32	129.437.400
		Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100	
9	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100	20.000.000
10	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100	259.545.400
		Persentase kinerja realisasi pupuk	37	
11	Program pengembangan ekspor	Tingkat Nilai Export bersih	1	178.790.000
		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	2	
12	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	90.000.000
		Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	50	
13	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,62	275.000.000
14	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	60	849.953.000
		Cakupan bina kelompok pengrajin	83,33	
15	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	20,71	49.974.000
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	
16	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	149.986.000
		Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	10	

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.267.151.484,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 18.138.959.284,- dan Belanja Modal Rp. 1.128.192.200,-.

Target belanja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 yaitu:

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	18.138.959.284	94,14
Belanja Modal	1.128.192.200	5,86
Jumlah	19.267.151.484	100

2.4. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.163.748.106	11,23	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.002.685.800	10,39	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.100.717.578	78,38	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

3.1.1. ANALISIS KINERJA ORGANISASI

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,7	85,94	95,81%
		Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86	11,86	100%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp	46.782.449.072	46.782.449.072	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100

Sumber: Renstra 2024-2026, Renja 2024, dan PK DKUPP 2024.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Dinas yang diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa indikator OPD:

1. Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2024 target 89,7 dengan realisasi 85,94 serta capaian sebesar 95,81 % (sangat tinggi);
2. Pertumbuhan UMKM pada tahun 2024 target 11,86 % dengan realisasi 11,86% serta capaian sebesar 100% (sangat tinggi);

3. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2024 target Rp. 46.782.449.072 dengan realisasi Rp. 46.782.449.072 serta capaian sebesar 100 % (sangat tinggi);
 4. Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 target Opini A dengan realisasi Opini A, serta capaian sebesar 100 % (sangat tinggi);
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 target Kategori Baik dengan realisasi Kategori Baik, capaian sebesar 100 % (sangat tinggi)
- Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM,Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 sebesar 99,2 % (Sangat Tinggi), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$\text{Capaian } 495,81/5 = 99,2 \%$

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (tahun 2024 dan tahun 2023) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Dari 5 (lima) indikator sasaran OPD, setelah membandingkan capaian indikator tahun 2023 dengan 2024, terlihat penurunan capaian sebesar 17,3 %. Namun demikian, bila dievaluasi terhadap target 2024 yang sebesar 99,2 %, kinerja Dinas sangat tinggi.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja DKUPP Kabupaten Purwakarta Tahun
2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10=9/8*100%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	A	128	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	*	*	*	80	81,9	102%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persen	*	*	*	89,7	85,94	96%
		Pertumbuhan UMKM	Persen	*	*	*	11,86	11,86	100%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp	*	*	*	46.782.449.072	46.782.449.072	100%

Sumber: RPD 2024-2026, Renstra 2024-2026, Renja 2024, RKT 2024, dan PK DKUPP 2024

Dari table diatas Tingkat capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023 dengan indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah masih dalam kategori A, indikator yang lainnya masih belum ada data karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta 2024- 2026.

D. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026 dimana capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai, sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta optimis dapat memenuhi target Renstra pada tahun 2024. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan
Target Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	89,7	85,94	95,81%	90,05	95,44%
		Pertumbuhan UMKM	11,86	11,86	100%	14,69	80,74%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	46.782.449.072	100%	48.711.421.360	96,04%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100	A	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	Baik	100%

Sumber: RPD 2024-2026, Renstra 2024-2026, Renja 2024, RKT 2024, dan PK DKUPP 2024.

E. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten Bandung

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2024 Kabupaten Bandung	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	85,94	52,91	162,43%
		Pertumbuhan UMKM	11,86	7,16	165,64%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pertumbuhan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah melebihi realisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan capaian sebesar 11,86%, serta realisasi

Persentase Koperasi Aktif Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah melebihi realisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan capaian sebesar 85,94%.

F. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi

Keberhasilan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.1 di atas. Indikator yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kinerja OPD diukur dari 5 (lima) IKU.

Untuk IKU pertama yaitu Persentase Koperasi Aktif Capaian indikator tersebut pada tahun 2024 tercapai dengan nilai capaian 95,81% (sangat tinggi), IKU yang kedua yaitu Pertumbuhan UMKM pada tahun 2024 tercapai target yang ditetapkan sebesar 11,86 % dari target 11,86 %, IKU yang ketiga yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2024 tercapai yang ditetapkan sebesar Rp. 46.782.449.072 dari target Rp. 46.782.449.072, IKU ke empat yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2024 tercapai yang ditetapkan Opini A dari target Opini A, IKU ke lima yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tercapai target yang ditetapkan Kategori Baik dari target Kategori Baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lima indikator pada Sasaran Strategis telah optimal memenuhi target pencapaian.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	89,7	85,94	95,81%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkankan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
		Pertumbuhan UMKM	11,86	11,86	100%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkankan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	46.782.449.072	100%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkankan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkankan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkankan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan

G. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel di bawah ini

Tabel 3.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	95,81	84,92	10,89
		Pertumbuhan UMKM	100	78,19	21,81

2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	100	91	9
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	93,45	6,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100	92,4	7,6

KET:

Capaian kinerja: realisasi indikator / target x 100 %

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi: capaian kinerja – penyerapan anggaran

H. Analisis keberhasilan ataupun kegagalan Program dan Kegiatan.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta bertanggungjawab atas 16 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayana Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
4. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
7. Program pengembangan umkm
8. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
9. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
10. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
11. Program pengembangan ekspor
12. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
13. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

14. Program perencanaan dan pembangunan industri
15. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
16. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (lima) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2024-2026 dan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Data pada Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat mencapai target.

Alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tersebut sebesar Rp. 19.267.151.484, untuk Bidang dan UPTD sebesar Rp. 4.166.433.906 dan sekretariat sebesar Rp. 15.100.717.578.

Selain itu, berbagai aksi inovasi yang dilakukan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta turut mendukung keberhasilan pencapaian kinerja OPD pada tahun 2024.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.7

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

s	Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Nama Program	Indikator	Tahun 2024				Menunjang/Tidak
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100							
2	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,7	85,94	95,81%	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,70	85,94	95,81%	Menunjang
							Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	89,70	85,94	95,81%	Menunjang
								Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	12,00	12,00	100%	Menunjang
							Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	72,82	72,82	100%	Menunjang
		Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86	11,86	100%	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	85,23	85,23	100%	Menunjang
								Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	56,46	56,46	100%	Menunjang
								Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	75,23	75,23	100%	Menunjang
								Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	2,53	2,53	100%	Menunjang
								Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	57,90	57,90	100%	Menunjang
								Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	20,56	20,56	100%	Menunjang
Program pengembangan umkm	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	9,63	9,63	100%	Menunjang							

4	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp	46.782.449.072	46.782.449.072	100%	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	64,62	31,60	49%	Menunjang
							Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	95,32		0%	Menunjang
								Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00		0%	Menunjang
							Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100	100	100%	Menunjang
							Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100	100	100%	Menunjang
								Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	37	37	100%	Menunjang
							Program pengembangan ekspor	Tingkat Nilai Export bersih	Persen	1		0%	Menunjang
								Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	2	2	100%	Menunjang
							Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	60	60	100%	Menunjang
								Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	83,33	83,33	100%	Menunjang

								Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	20,71		0%	Menunjang
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100%	Menunjang
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	0,00	0%	Menunjang
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100%	Menunjang
								Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1,00	100%	Menunjang
								Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10	10	100%	Menunjang

3.1.2. KESIMPULAN HASIL ANALISIS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 5 (lima) indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Pertumbuhan UMKM
3. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
4. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sampai tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sebesar 99,2 %, termasuk pada kategori SANGAT TINGGI. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 telah tercapai.

3.2. PRESTASI OPD YANG DI RAIH SELAMA TAHUN 2024 DAN INOVASI

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.

Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/Intansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu OPD, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi di antara para pegawainya. Begitu pula dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih. Prestasi Kerja yang diraih yaitu:

Tabel 3.8 penghargaan

No.	Nama Penerima Penghargaan	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Kategori keramik (menong geulis)	Karya Kriya Potensial	Ketua Umum Dekranas
2	DTU Pasar Citeko	Pasar Tertib Ukur	Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
3	DTU Pasar Bojong	Pasar Tertib Ukur	Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
4	Capaian Produksi di SIINAs	Capaian Produksi di SIINAs	Gubernur Jawa Barat

Tabel 3.9 INOVASI

No.	Judul Inovasi	Jenis Inovasi	Pengusul
1	Sistem Informasi DKUPP	Aplikasi SIDKUPP	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam Tabel 3.5. berikut disajikan rincian target dan realisasi anggaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024:

1. Realisasi Keuangan berdasarkan Indikator.
 - a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 179.322.100 dapat terealisasi sebesar Rp. 167.577.970 atau sebesar 93,45 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.322.100	167.577.970	93,45%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	65.701.970	85,02%

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	5.303.000	99,84%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100	5.054.000	99,70%
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.198.100	5.161.000	99,29%
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.007.900	4.978.000	99,40%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	52.550.000	99,98%
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	28.830.000	99,77%

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 15.100.717.578 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.954.714.191 atau sebesar 92,41 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.100.717.578	13.954.714.191	92,41%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.322.100	167.577.970	93,45%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	65.701.970	85,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	5.303.000	99,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100	5.054.000	99,70%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.198.100	5.161.000	99,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.007.900	4.978.000	99,40%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	52.550.000	99,98%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	28.830.000	99,77%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.995.325.676	9.116.238.805	91,21%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.325.676	9.099.306.805	91,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	6.984.000	69,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.948.000	99,48%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.165.700	9.508.000	78,15%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.632.100	0	0,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.533.600	9.508.000	99,73%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	#DIV/0!
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	#DIV/0!
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	#DIV/0!
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.556.206	115.866.000	76,45%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.600	9.732.000	97,32%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.999.600	19.894.000	99,47%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.557.006	86.240.000	70,95%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.942.900	1.517.044.150	98,77%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.000	49.999.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.804.000	170.804.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.993.000	49.993.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.025.966.900	1.009.186.900	98,36%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.290.000	105.290.000	100,00%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	18.016.000	90,08%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99.871.250	99,87%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.890.000	13.884.000	99,96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.832.000	236.283.100	99,77%
	Pengadaan Mebel	103.192.000	103.192.000	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.640.000	133.091.100	99,59%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.812.389.296	1.650.634.975	91,08%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.984.528	184.724.995	73,89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.404.768	1.460.909.980	93,80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.183.700	1.141.561.191	96,97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	50.000.000	62,50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.718.100	39.901.900	98,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000	24.550.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.031.915.600	1.027.109.291	99,53%

c. Persentase Koperasi Aktif

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 564.707.600 dapat terealisasi sebesar Rp. 479.549.500 atau sebesar 84,91 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	17.472.000	34,94%
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	17.472.000	34,94%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	17.472.000	34,94%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	125.000.000	83.586.600	66,87%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000	83.586.600	66,87%
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125.000.000	83.586.600	66,87%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000	188.883.400	94,44%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	188.883.400	94,44%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	200.000.000	188.883.400	94,44%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	189.707.600	189.607.500	99,95%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	189.707.600	189.607.500	99,95%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	189.707.600	189.607.500	99,95%
	Jumlah	564.707.600	479.549.500	84,91%

d. Pertumbuhan UMKM

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh, Pada APBD dan DBHCHT

2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.599.040.506 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.250.294.320 atau sebesar 78,19 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.060.882.816	735.397.270	69,32%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.060.882.816	735.397.270	69,32%
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	68.036.000	8.956.000	13,16%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270.270.400	23.002.900	8,51%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	599.992.300	598.284.370	99,72%
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.302.616	37.738.500	75,02%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	72.281.500	67.415.500	93,27%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	538.157.690	514.897.050	95,68%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	538.157.690	514.897.050	95,68%
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	538.157.690	514.897.050	95,68%
	Jumlah	1.599.040.506	1.250.294.320	78,19 %

- e. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
- Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB, Pada APBD 2024

dianggarkan sebesar Rp. 2.002.685.800 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.822.540.300 atau sebesar 91 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	129.437.400	95.169.400	73,53%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	64.439.400	49.439.400	76,72%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.439.400	49.439.400	76,72%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	8.120.000	54,13%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	8.120.000	54,13%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	14.998.000	14.998.000	100,00%
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	14.998.000	14.998.000	100,00%
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	20.000.000	7.612.000	38,06%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000	7.612.000	38,06%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	20.000.000	100,00%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.545.400	208.825.000	80,46%

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	29.999.200	9.733.500	32,45%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	4.280.500	28,54%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	5.453.000	36,35%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	214.547.600	188.419.500	87,82%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.549.600	10.851.500	74,58%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199.998.000	177.568.000	88,78%
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.998.600	10.672.000	71,15%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.998.600	10.672.000	71,15%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	178.790.000	175.510.000	98,17%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.790.000	175.510.000	98,17%
	Pameran Dagang Nasional	78.890.000	76.260.000	96,67%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	99.900.000	99.250.000	99,35%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90.000.000	84.000.000	93,33%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90.000.000	84.000.000	93,33%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	49.500.000	99,00%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	34.500.000	86,25%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.000.000	233.193.800	84,80%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	275.000.000	233.193.800	84,80%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	181.025.700	90,51%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	75.000.000	52.168.100	69,56%

	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	849.953.000	806.549.700	94,89%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	849.953.000	806.549.700	94,89%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	142.765.600	95,18%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	149.971.000	143.876.500	95,94%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	549.982.000	519.907.600	94,53%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	49.974.000	49.974.000	100,00%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.974.000	49.974.000	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	49.974.000	49.974.000	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Jumlah	2.002.685.200	1.822.540.300	91%

2. Realisasi Keuangan Belanja Gaji dan Tunjangan

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menganggarkan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salah satu komponen Belanja Operasi sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang harus tersedia dan tidak boleh terlambat di dalam pembayarannya, pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 9.975.325.676 dan terealisasi sebesar Rp. 9.099.306.805 atau sebesar 91,22 %.

3. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.100.717.578	13.954.714.191	92,41%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.322.100	167.577.970	93,45%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	65.701.970	85,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	5.303.000	99,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100	5.054.000	99,70%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.198.100	5.161.000	99,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.007.900	4.978.000	99,40%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	52.550.000	99,98%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	28.830.000	99,77%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.995.325.676	9.116.238.805	91,21%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.325.676	9.099.306.805	91,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	6.984.000	69,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.948.000	99,48%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.165.700	9.508.000	78,15%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.632.100	0	0,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.533.600	9.508.000	99,73%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	#DIV/0!
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	#DIV/0!
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	#DIV/0!
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.556.206	115.866.000	76,45%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.600	9.732.000	97,32%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.999.600	19.894.000	99,47%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.557.006	86.240.000	70,95%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.942.900	1.517.044.150	98,77%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.000	49.999.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.804.000	170.804.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.993.000	49.993.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.025.966.900	1.009.186.900	98,36%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.290.000	105.290.000	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	18.016.000	90,08%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99.871.250	99,87%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.890.000	13.884.000	99,96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.832.000	236.283.100	99,77%
	Pengadaan Mebel	103.192.000	103.192.000	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.640.000	133.091.100	99,59%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.812.389.296	1.650.634.975	91,08%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.984.528	184.724.995	73,89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.404.768	1.460.909.980	93,80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.183.700	1.141.561.191	96,97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	50.000.000	62,50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.718.100	39.901.900	98,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000	24.550.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.031.915.600	1.027.109.291	99,53%
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	17.472.000	34,94%
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	17.472.000	34,94%

	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	17.472.000	34,94%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	125.000.000	83.586.600	66,87%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000	83.586.600	66,87%
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125.000.000	83.586.600	66,87%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000	188.883.400	94,44%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	188.883.400	94,44%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	200.000.000	188.883.400	94,44%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	189.707.600	189.607.500	99,95%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	189.707.600	189.607.500	99,95%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	189.707.600	189.607.500	99,95%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.060.882.816	735.397.270	69,32%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.060.882.816	735.397.270	69,32%
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	68.036.000	8.956.000	13,16%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270.270.400	23.002.900	8,51%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	599.992.300	598.284.370	99,72%
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.302.616	37.738.500	75,02%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	72.281.500	67.415.500	93,27%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	538.157.690	514.897.050	95,68%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	538.157.690	514.897.050	95,68%

	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	538.157.690	514.897.050	95,68%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	129.437.400	95.169.400	73,53%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	64.439.400	49.439.400	76,72%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.439.400	49.439.400	76,72%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	8.120.000	54,13%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	8.120.000	54,13%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	14.998.000	14.998.000	100,00%
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	14.998.000	14.998.000	100,00%
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	20.000.000	7.612.000	38,06%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000	7.612.000	38,06%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	20.000.000	100,00%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.545.400	208.825.000	80,46%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	29.999.200	9.733.500	32,45%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	4.280.500	28,54%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	5.453.000	36,35%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	214.547.600	188.419.500	87,82%

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.549.600	10.851.500	74,58%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199.998.000	177.568.000	88,78%
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.998.600	10.672.000	71,15%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.998.600	10.672.000	71,15%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	178.790.000	175.510.000	98,17%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.790.000	175.510.000	98,17%
	Pameran Dagang Nasional	78.890.000	76.260.000	96,67%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	99.900.000	99.250.000	99,35%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90.000.000	84.000.000	93,33%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90.000.000	84.000.000	93,33%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	49.500.000	99,00%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	34.500.000	86,25%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.000.000	233.193.800	84,80%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	275.000.000	233.193.800	84,80%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	181.025.700	90,51%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	75.000.000	52.168.100	69,56%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	849.953.000	806.549.700	94,89%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	849.953.000	806.549.700	94,89%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	142.765.600	95,18%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	149.971.000	143.876.500	95,94%

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	549.982.000	519.907.600	94,53%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	49.974.000	49.974.000	100,00%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.974.000	49.974.000	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	49.974.000	49.974.000	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	149.986.000	149.318.400	99,55%
	Jumlah	19.267.151.484	17.507.098.311	90,87%

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis OPD dan 6 (enam) indikator kinerja utama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 secara umum tujuan, sasaran maupun program, kegiatan dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026 dikategorikan SANGAT TINGGI. Kategori Sangat Tinggi Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 99,2%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta antara lain semakin meningkatnya

kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan baik.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, antara lain:

1. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP; dan
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



MUHAMMAD HUSNI, SH, MH
NIP. 19670424 198703 1 003